

**Draft Usulan Rencana Aksi OGI 2023-2024**  
**Penguatan Keterbukaan Data *Beneficial Ownership***  
**WG – Natural Resources, Environment and Energy**

<b>Judul Komitmen:</b> <b>Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership Melalui Penguatan Verifikasi dan Pemanfaatan Data Beneneficial Ownership</b>	
Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul: Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Auriga Nusantara Transparansi International (TI) Indonesia Indonesia Corruption Watch (ICW)	
<b>Periode Implementasi Rencana Aksi:</b> Januari 2023 – Desember 2024	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi</li><li>2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>3. Kementerian ESDM</li><li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>5. Kementerian Pertanian</li><li>6. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,</li><li>7. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional</li><li>8. Kementerian Keuangan,</li><li>9. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,</li><li>10. Kementerian Perdagangan,</li><li>11. Komisi Pemberantasan Korupsi,</li></ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>12. Lembaga Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,</li><li>13. Otoritas Jasa Keuangan,</li><li>14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li></ol>
Deskripsi Komitmen	

Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?

Dalam satu dekade terakhir, isu keterbukaan data/informasi mengenai kepemilikan manfaat korporasi, atau Beneficial Ownership (BO) terus menguat dan mengundang ketertarikan pihak pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan dan juga kalangan korporasi sendiri. Keterbukaan data/informasi BO diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dengan mengurangi risiko finansial bagi investor dan sekaligus menciptakan iklim bisnis yang adil. Praktek keterbukaan data/informasi BO kepada publik di berbagai negara telah menunjukkan adanya preseden dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan korporasi sekaligus mendorong pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan dan korupsi yang dapat merugikan korporasi itu sendiri, publik maupun iklim dan kepercayaan investor.

Di Indonesia, Payung hukum pelaksanaan pengungkapan BO di Indonesia telah diterbitkan pada Maret 2018 melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Melalui sinergi antar sejumlah inisiatif antara lain Open Government Indonesia (OGI), Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI), Financial Act Task Force (FATF) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan dukungan berbagai stakeholder termasuk masyarakat sipil, transparansi BO terus didorong implementasinya.

Tahun 2018-2020, pelaksanaan aksi transparansi BO diarahkan pada penguatan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Selanjutnya, pada tahun 2020-2022, aksi BO diarahkan pada penguatan basis data BO, akses publik terhadap basis data serta pemanfaatan data BO untuk perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan penegakan hukum.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dan hambatan, diantaranya:

1. Sejumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung jawab aksi belum memiliki basis data BO serta regulasi yang mewajibkan untuk deklarasi BO ketika proses perizinan
2. Kewajiban untuk deklarasi BO belum menjadi penapis dalam proses perizinan
3. Kendala administratif (belum adanya Memorandum of Understanding/MoU dan PKS) maupun teknis (pertukaran data melalui sistem) masih dihadapi oleh Kementerian/Lembaga
4. Kepatuhan korporasi masih rendah karena ketiadaan sanksi
5. Belum berjalannya mekanisme verifikasi data yang dideklarasikan oleh korporasi yang berdampak pada kualitas data
6. Minimnya peran serta masyarakat

Oleh karena itu, program ini diusulkan sebagai program tindak lanjut bersama di antara K/L dan pihak terkait. Hal tersebut didasarkan atas evaluasi pelaksanaan Renaksi 2018-2020 dan 2020-2022 yang sejauh ini sudah mengalami kemajuan dengan dibukanya data BO maupun data BO sebagai syarat dalam pengajuan izin di sektor ekstraktif.

Selain itu, upaya penguatan dan pemanfaatan keterbukaan data BO ini juga ditujukan bagi terselenggaranya agenda pembangunan yang sejalan dengan SDGs sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

<p>Apa bentuk komitmennya?</p>	<p>Optimalisasi Implementasi Keterbukaan Data Beneficial Ownership Melalui Penguatan Verifikasi dan Pemanfaatan Data Beneficial Ownership</p>
<p>Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?</p>	<p>Melalui transparansi beneficial ownership (BO), individu yang teridentifikasi sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) dan memiliki rekam jejak yang buruk atau dinilai berisiko tinggi untuk melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, pencucian uang maupun terorisme, maka langkah-langkah mitigasi risiko penyalahgunaan korporasi dapat diterapkan.</p> <p>Transparansi BO sangat bermanfaat dalam proses perizinan, khususnya untuk membantu instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan uji tuntas (<i>due diligence</i>).</p> <p>Data BO yang melakukan permohonan izin juga dapat digunakan untuk mendeteksi hubungan afiliasi antara korporasi yang melakukan permohonan izin dengan instansi pemerintah yang menerbitkan izin.</p> <p>Melalui penelusuran BO, masyarakat dapat menilai apakah seorang pejabat publik berkomitmen untuk bekerja demi kesejahteraan rakyatnya, meninggalkan bisnisnya serta tidak berupaya untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan yang dahulu ia kendalikan.</p>
<p>Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?</p>	<p>Komitmen ini akan mendukung nilai Keterbukaan Pemerintah yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.</p>

Kesesuaian dengan RPJMN/RKP dan SDGs	<p>Komitmen ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yakni Program Administrasi Hukum Umum terutama kebijakan pendukung penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Badan Usaha.</p> <p>Selain itu, komitmen ini berkaitan dengan target SDGs No. 17: "Memperkuat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan", terutama pada target 17.1: "memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional ke negara- negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas domestik untuk pajak dan pengumpulan pendapatan lainnya".</p>	
Informasi tambahan		
<b>Milestone</b>		
Indikator capaian	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
<p>1. <i>Cleansing Data, yang meliputi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya standar data BO</li> <li>b. Perbaikan data BO dengan menyandingkan Data BO di Ditjen AHU dengan data <i>legal owner</i>, (data AHU online), dataNIK dari Kemendagri, NPWP, maupun data BO yang berasal dari K/L</li> <li>c. Pertukaran data KL dengan</li> </ul>	1 Januari 2023	31 Desember 2023

Kementerian Hukum dan HAM		
2. Verifikasi Data	1 Januari 2024	31 Desember 2024
3. Pemanfaatan Data BO	1 Januari 2022	31 Desember 2024
<b>Informasi Kontak</b>		
Nama PIC dari Kementerian Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi</li> <li>2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ol>	
K/L terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian ESDM</li> <li>2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>3. Kementerian Pertanian</li> <li>4. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal,</li> <li>5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>6. Kementerian Keuangan,</li> <li>7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,</li> <li>8. Kementerian Perdagangan,</li> <li>9. Komisi Pemberantasan Korupsi,</li> <li>10. Lembaga Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,</li> <li>11. Otoritas Jasa Keuangan,</li> </ol>	

	12. 12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Organisasi Masyarakat Sipil Kolaborator	Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Auriga Nusantara Transparansi International (TI) Indonesia Indonesia Corruption Watch (ICW)
Potensi Mitra Pembangunan (Donor)	